

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alkotsar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta
- Arsyad, Jawade Hafids, 2013, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Jakarta
- Azhary, Muhammad Taher, 1992, *Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsip nya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia, Malang
- Friedman, Lawrence M, 2011, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial. terj. The Legal System ; A Social Science Prespective*, Nusa Media, Bandung
- Harta, H.L.A, 1961, *The Concept of Law*, New York
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintah Daerah-Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung
- Kaligis, O.C, 2015, *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan (Pasca UU No. 30 Tahun 2014)*, Alumni, Bandung
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi; Panduan untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- Kumorotomo, Wahyudi, 2008, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Manan, Bagir dan Kuntara Magnar, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung
- Martiman, Projohamidjojo, 1989, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Paramita, Jakarta
- , 2001. *Pembuktian Terbalik dalam Berkorupsi*. Mandar Maju, Bandung

- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*, Kencana, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- Moleong, Lexy J, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nilson, Hans G, 1988, *Future Corruption in Europe, Fift International Anti Corruption Conference*, New York
- R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Seno Adji, Indriyanto, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta
- , 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Keempat*, Alumni, Bandung
- Sutopo, H.B, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta
- Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law 3rd Edition*, Lawbook, New York
- Tjandra, Riawan, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Yunara, Edi, 2012, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berikut Studi Kasus*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572 K/Pid/2003 tanggal
12 Februari 2004

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 979 K.Pid/2004 tanggal 10
Juni 2005

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia
telah mengeluarkan Surat Nomor : B-2436/F/Fd.1/10/2016 tanggal 27
Oktober 2016 tentang Parameter Penyalahgunaan Wewenang dan
Kewenangan

C. Karya Ilmiah, Jurnal dan Internet

Agus Budi Susilo, 2015, *Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau
Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang
baik*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Bandung

Irawan, Benny, 2011, *Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi : Kajian
Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas*, Mimbar,
Vol XXVII, No 2, Jakarta

Ratu, Alfian, 2012, *Penerapan Freis Ermessen Kepala Daerah Dalam
Pengelolaan Keuangan Dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,
Varia Peradilan, Vol XX/No.03/April-Juni/2012, Jakarta.

Sufriadi, 2014, *Tanggungjawab Jabatan dan Tanggungjawab Pribadi dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia*, dalam Jurnal Yuridis Vol I,
Jakarta.

Rayakan HUT ke-62, Ikahi Gelar Seminar Nasional, tersedia di
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5513800360fe1/rayakan-hut-ke-62--ikahi-gelar-seminar-nasional>, diakses pada 28 Oktober 2016